

Peran Pendidikan dan Pelatihan dalam Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa di Kabupaten Kotabaru

M Najeri Al Syahrin¹, Ismar Hamid², Rachmat Hidayat³, Rahmat Nur⁴, Siti Zulaikha⁵, M Nizar Hidayat⁶, Hery Hermawan⁷, Charennina Marsha Diandra⁸

1 Universitas Lambung mangkurat ; najeri.syahrin@ulm.ac.id

2 Universitas Lambung mangkurat ; ismar.hamid@ulm.ac.id

3 Bapperida kotabaru; rch_hidayat@yahoo.com

4 Universitas Lambung mangkurat ; rahmat.nur@ulm.ac.id

5 Universitas Lambung mangkurat ; siti.zulaikha@ulm.ac.id

6 Universitas Lambung mangkurat ; nizar.hidayat@ulm.ac.id

7 Universitas Lambung mangkurat ; herryktb831@gmail.com

8 Universitas Lambung mangkurat ; marshacharen@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

*Village officials capacity;
Education and training;
Village development
planning;
Digital governance*

Article history:

Received 2025-12-28

Revised 2026-01-06

Accepted 2026-01-06

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of education and training in enhancing the capacity of village government officials in Kotabaru Regency. The research employed a descriptive qualitative approach, supported by quantitative data from a survey of 200 village officials. Data were collected through in-depth interviews, observations, documentation, and online questionnaires. The findings indicate that training plays a crucial role in improving the knowledge, skills, and work ethics of village officials, particularly in the areas of development planning and digital administration. The most urgent training needs identified include village potential analysis, the preparation of RPJMDes (Village Medium-Term Development Plans) and RKPDDes (Village Government Work Plans), and the utilization of e-Government applications such as Siskeudes and SIPADES. The main obstacles to training implementation are long travel distances, limited funding, and training materials that are not fully relevant to field conditions. The study recommends that local governments design continuous, contextual, and needs-based training programs to promote effective and responsive village governance.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Corresponding Author:

M Najeri Al Syahrin

Universitas Lambung Mangkurat;;Indonesia; najeri.syahrin@ulm.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Kata Kunci:

*kapasitas aparatur desa;
pendidikan dan pelatihan;
perencanaan pembangunan
desa;
digitalisasi pemerintahan.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Kotabaru. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah survey dan kualitatif deskriptif, dengan dukungan data kuantitatif dari hasil survei terhadap 200 aparatur desa. Data dikumpulkan melalui

*Article history:**Received 2025-12-28**Revised 2026-01-06**Accepted 2026-01-06*

*wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan kuesioner daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan etika kerja aparatur desa, terutama dalam bidang perencanaan pembangunan dan digitalisasi administrasi pemerintahan. Kebutuhan pelatihan yang paling mendesak adalah analisis potensi desa, penyusunan RPJMDes dan RKPDDes, serta pemanfaatan aplikasi e-Government seperti Siskeudes dan SIPADES. Adapun hambatan utama dalam pelaksanaan pelatihan meliputi jarak lokasi yang jauh, keterbatasan anggaran, serta kurang relevannya materi dengan kondisi lapangan. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah melaksanakan program pelatihan yang berkelanjutan, kontekstual, dan berbasis kebutuhan aparatur desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.**This is an open access article under the CC BY-SA license.*

*Penulis Koresponden :**M Najeri Al Syahrin**Universitas Lambung Mangkurat;;Indonesia; najeri.syahrin@ulm.ac.id*

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan desa di Indonesia memegang peranan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan lokal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa desa tidak hanya sebagai unit administratif, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan warga desa. Untuk bisa menjalankan amanat tersebut, diperlukan aparatur desa yang kompeten yaitu aparatur yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai kebutuhan tugas pemerintahan desa. Namun kenyataannya, banyak desa menghadapi tantangan dalam hal kapasitas aparatur, terutama dalam pengelolaan administrasi, keuangan, pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat (Sugiman, 2018).

Di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, tantangan kapasitas aparatur desa juga muncul nyata. Menurut observasi awal yang dilakukan peneliti, Kabupaten Kotabaru terdiri dari 198 desa dengan karakter wilayah yang luas dan kondisi geografis yang beragam, yang tentunya menuntut kemampuan aparatur desa yang mumpuni untuk menjamin pemerataan pelayanan public (BPS, 2025). Permasalahan Aparatur di tingkat desa masih memiliki keterbatasan kompetensi, terutama dalam pengelolaan keuangan desa, administrasi, serta aspek teknis yang diperlukan dalam penggunaan sumber daya, yang memicu risiko penyimpangan dalam penggunaan dana desa dan inefisiensi dalam pelayanan.

Salah satu upaya pemerintah dalam merespon kebutuhan peningkatan kapasitas ini adalah melalui program pelatihan dan pembinaan (S. Nugroho et al., 2023). Program seperti Desa Anti-Maladministrasi (DAM) yang diusung di Kotabaru (R. A. Nugroho & Septiana, 2022), juga menempatkan peningkatan kapasitas aparatur desa sebagai salah satu pilar utama program tersebut. Menurut observasi yang dilakukan pada bulan agustus 2025, salah satu kepala desa di wilayah teluk Gosong Dengan adanya pelatihan, diharapkan kualitas pelayanan kepada masyarakat bisa meningkat, penyelenggaraan administrasi desa jadi lebih transparan dan akuntabel, serta aparatur desa mampu beradaptasi terhadap tuntutan tata kelola modern. Di sisi lain, tantangan muncul terkait bagaimana pelatihan tersebut dirancang dan dilaksanakan. Pelatihan yang bersifat sporadis, kurangnya kesesuaian materi dengan kebutuhan nyata di lapangan, serta keterbatasan sumber daya pelatih menjadi beberapa hambatan yang sering dilaporkan. Contohnya, studi pengabdian masyarakat di Desa Senaken kecamatan kalumpang tengah menunjukkan bahwa rendahnya kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi dan keuangan menjadi kendala utama, dan bahwa pelatihan harus bersifat terstruktur dan berkelanjutan agar efektif.

Selanjutnya, efektivitas pelatihan juga sangat bergantung pada dukungan kebijakan dan fasilitas dari pemerintah daerah. Di Kotabaru, selain pelatihan, pemerintah kabupaten telah melakukan langkah-langkah lain seperti pemberian fasilitas mobil operasional bagi kepala desa agar mobilitas dan koordinasi pelayanan ke masyarakat lebih lancar. Namun fasilitas saja tidak cukup bila tidak diiringi peningkatan kapasitas manusia, aparatur agar fasilitas dan kebijakan dapat dipergunakan secara optimal. Berkaitan dengan hal tersebut, penting pula melihat dampak pelatihan terhadap aspek-aspek spesifik kapasitas seperti kepemimpinan, pengelolaan administrasi dan keuangan desa, perencanaan pembangunan, kemampuan teknologi informasi, komunikasi, serta kemampuan manajerial lainnya. Literatur menunjukkan bahwa pelatihan yang memberikan materi kepemimpinan, kewirausahaan, pengelolaan keuangan desa, dan perencanaan pembangunan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kompetensi aparatur desa.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan di Kabupaten Kotabaru untuk mengetahui secara empiris bagaimana peran pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa dan apa saja faktor pendukung dan penghambatnya sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan bisa lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Hal ini juga relevan agar strategi peningkatan kapasitas bisa mendukung

pemerintahan desa yang bersih, responsif, dan efektif dalam memenuhi kebutuhan warga desa.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixmethod* karena bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana pendidikan dan pelatihan berperan dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Kotabaru. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menelusuri makna, pengalaman, serta persepsi aparatur desa terhadap pelaksanaan program pelatihan yang mereka ikuti. Menurut (Creswell & Creswell, 2017) penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan secara holistik melalui deskripsi mendalam dalam konteks alami. Dengan demikian, metode ini cocok digunakan karena fokus penelitian bukan untuk menguji hipotesis, melainkan menggali makna di balik fakta dan pengalaman yang dialami oleh aparatur desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif survey dan deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang berusaha menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai situasi, peristiwa, serta hubungan antarfenomena yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini berfokus pada upaya memahami proses penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bentuk peningkatan kapasitas yang terjadi, serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas pelatihan. Sejalan dengan pendapat Moleong (Thalib, 2022), penelitian deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan realitas sosial dengan kata-kata berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan secara mendalam dan apa adanya. Teknik Penentuan Informan dengan menggunakan purposive sampling dengan jumlah informan 12 Kepala desa, 15 sekretaris desa, 75 aparatur desa yang mewakili desa pesisir dan desa pegunungan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui survey dengan kuesioner dan wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, serta pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotabaru yang terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan. Observasi dilakukan untuk melihat langsung bagaimana aparatur menerapkan hasil pelatihan dalam kegiatan pemerintahan desa. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk menelaah data sekunder seperti laporan pelatihan, pedoman kegiatan, serta dokumen kebijakan daerah. Penggunaan ketiga teknik ini sesuai dengan pandangan Sugiyono (Agustianti et al., 2022) bahwa triangulasi metode menggabungkan

wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat meningkatkan validitas data dalam penelitian kualitatif.

Analisis data dilakukan sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian menggunakan model interaktif Miles & Huberman, (Annisa & Mailani, 2023) yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian data disajikan dalam bentuk narasi dan matriks tematik agar pola dan hubungan dapat terlihat jelas. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu dari fakta empiris di lapangan menuju temuan konseptual yang menjelaskan peran pendidikan dan pelatihan terhadap peningkatan kapasitas aparatur desa. Dengan proses ini, hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran utuh dan mendalam tentang efektivitas pelatihan dalam konteks pemerintahan desa di Kabupaten Kotabaru.

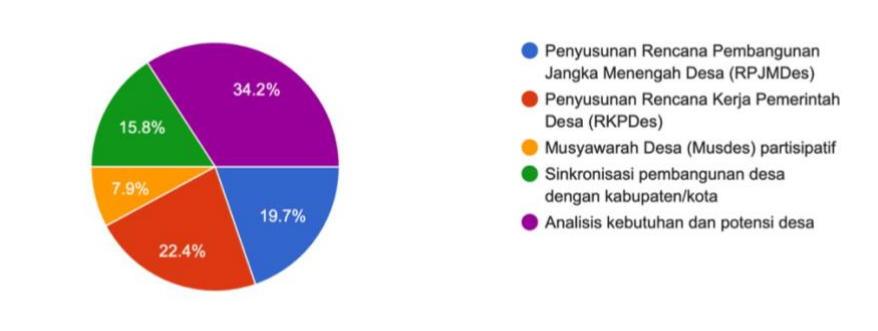
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, pendidikan dan pelatihan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Kotabaru, karena keduanya berkontribusi langsung terhadap peningkatan kompetensi, profesionalitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa melalui program pendidikan formal serta pelatihan teknis dan manajerial, aparatur desa mampu memahami regulasi pembangunan desa secara lebih komprehensif, meningkatkan kemampuan administrasi, serta menerapkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, pelatihan berkesinambungan mendorong adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi, sehingga aparat desa lebih siap menghadapi tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis. Namun demikian, efektivitas pendidikan dan pelatihan masih dipengaruhi oleh faktor sarana, dukungan kebijakan, serta motivasi aparatur desa itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan program pelatihan yang terencana dan berkelanjutan untuk memastikan peningkatan kinerja pemerintahan desa berjalan optimal. Beberapa temuan yang kompleks dapat dilihat sebagai berikut :

3.1. *Pelatihan dan Pendidikan aparatur desa yang paling mendesak*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan memiliki peran penting dalam membentuk kompetensi dan profesionalisme aparatur desa di Kabupaten Kotabaru. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan beberapa kepala desa, sekretaris

desa, dan perangkat lainnya, ditemukan bahwa pelatihan menjadi sarana untuk memperluas wawasan aparatur desa tentang tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam pengelolaan administrasi, perencanaan pembangunan, serta pengelolaan keuangan desa. Menurut (Creswell & Creswell, 2017) penelitian kualitatif berfokus pada pengalaman subjektif partisipan dalam konteks sosial yang alami, sehingga hasil ini diperoleh dari pandangan langsung para pelaku di lapangan.



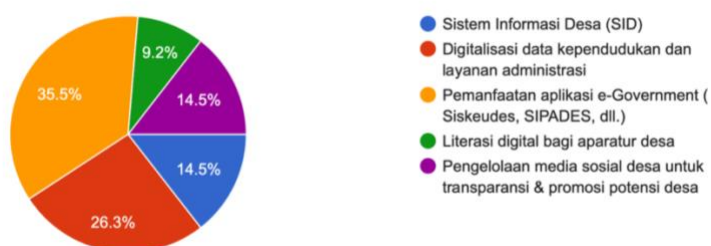
Gambar 1.1. Pendidikan dan Pelatihan yang paling mendesak dibidang perencanaan desa

Berdasarkan hasil survei terhadap 200 responden aparatur desa di Kabupaten Kotabaru, diperoleh gambaran mengenai aspek pelatihan yang dianggap paling mendesak dalam bidang perencanaan pembangunan desa. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas responden, yaitu 34,2%, menilai pelatihan analisis kebutuhan dan potensi desa merupakan hal yang paling mendesak untuk dilakukan. Temuan ini menunjukkan bahwa aparatur desa menyadari pentingnya kemampuan melakukan analisis situasi dan potensi lokal sebelum menyusun perencanaan pembangunan. Hal ini sejalan dengan pandangan Sutoro Eko (2020) yang menyatakan bahwa pembangunan desa yang efektif harus dimulai dengan identifikasi potensi dan masalah lokal berbasis data partisipatif.

Selanjutnya, sebanyak 22,4% responden menyatakan bahwa pelatihan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) menjadi prioritas utama. RKPDes merupakan dokumen strategis tahunan yang menjabarkan arah kebijakan pembangunan desa. Beberapa responden menilai bahwa selama ini mereka masih mengalami kesulitan dalam merumuskan kegiatan dan program yang terukur serta sinkron dengan RPJMDes. Oleh karena itu, pelatihan teknis dalam penyusunan RKPDes dianggap penting untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam merancang program yang realistis, terukur, dan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Sementara itu, 19,7% responden menilai bahwa pelatihan penyusunan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) perlu mendapat perhatian. Dokumen ini menjadi pedoman arah pembangunan selama enam tahun, sehingga kesalahan dalam penyusunan dapat berdampak panjang terhadap arah kebijakan desa. Hasil wawancara mendukung data ini; banyak aparatur desa mengaku bahwa RPJMDes sering kali disusun hanya untuk memenuhi tuntutan administratif, bukan sebagai panduan strategis. Oleh karena itu, mereka berharap ada pelatihan mendalam yang tidak hanya fokus pada format dokumen, tetapi juga pada perencanaan partisipatif dan analisis data pembangunan.

Menariknya, hanya 15,8% responden yang menilai sinkronisasi pembangunan desa dengan pemerintah kabupaten/kota sebagai kebutuhan mendesak, dan 7,9% yang memilih musyawarah desa (Musdes) partisipatif sebagai prioritas pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa fokus utama aparatur masih pada aspek teknis penyusunan dokumen dibandingkan penguatan koordinasi lintas tingkat dan partisipasi masyarakat. Padahal, menurut Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (2023), efektivitas pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh perencanaan teknis, tetapi juga oleh keterlibatan warga dan sinergi antar level pemerintahan. Temuan ini menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah agar program pelatihan berikutnya lebih seimbang antara aspek teknis, partisipatif, dan koordinatif dalam perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Kotabaru.



Gambar 1.2 Analisis Pendidikan dan Pelatihan yang paling mendesak dibidang Teknologi Informasi dan Digitalisasi Desa

Lebih lanjut terkait kebutuhan pelatihan di bidang teknologi informasi dan digitalisasi desa masih sangat tinggi. Sebagian besar responden, yaitu 35,5%, menilai bahwa pelatihan yang paling mendesak adalah terkait pemanfaatan aplikasi e-Government, seperti Siskeudes, SIPADES, dan aplikasi pelayanan publik lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur desa sudah mulai menyadari pentingnya digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan desa untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Temuan ini sejalan dengan pendapat Indrajit (2020)

yang menyatakan bahwa penerapan e-Government di tingkat desa merupakan langkah strategis menuju pemerintahan yang transparan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, 26,3% responden menilai bahwa digitalisasi data kependudukan dan layanan administrasi desa merupakan prioritas pelatihan yang mendesak. Banyak aparatur desa mengakui bahwa proses administrasi kependudukan masih dilakukan secara manual, sehingga memperlambat pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya pelatihan digitalisasi, mereka berharap dapat mengelola data kependudukan secara lebih cepat, akurat, dan aman. Salah satu perangkat desa menyampaikan bahwa pelatihan ini penting agar mereka dapat menggunakan sistem berbasis digital dalam penerbitan surat dan pencatatan penduduk, sehingga mengurangi potensi kesalahan input data. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Handayani (2022) yang menegaskan bahwa digitalisasi administrasi desa mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja aparatur.

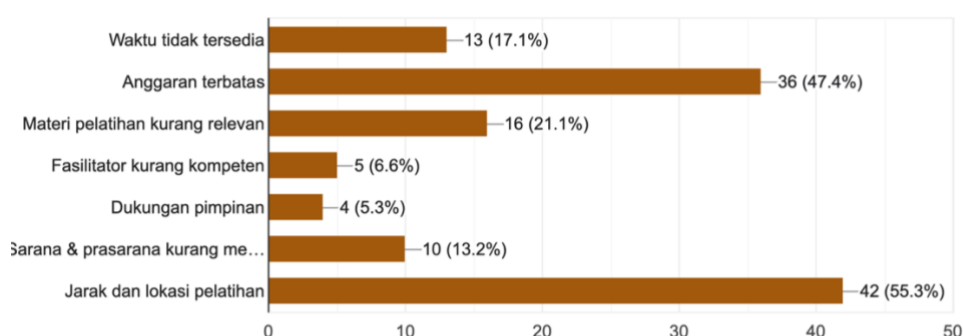
Sementara itu, 14,5% responden memilih pelatihan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai kebutuhan mendesak, dan jumlah yang sama juga memilih pengelolaan media sosial desa untuk transparansi dan promosi potensi desa. Kebutuhan ini menggambarkan bahwa sebagian aparatur desa ingin memperkuat kemampuan mereka dalam mengelola informasi dan komunikasi publik berbasis digital. Melalui SID, desa dapat menampilkan data profil, kegiatan, dan potensi desa secara terbuka, sedangkan media sosial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta mempromosikan produk unggulan desa. Seperti dikemukakan oleh Nasrullah (2021), kemampuan mengelola komunikasi digital di tingkat desa dapat memperkuat branding desa dan memperluas jejaring ekonomi lokal.

Adapun 9,2% responden menganggap pelatihan literasi digital bagi aparatur desa merupakan kebutuhan mendesak. Meskipun persentasenya paling kecil, aspek ini sebenarnya menjadi fondasi utama dalam penerapan teknologi di pemerintahan desa. Rendahnya tingkat literasi digital menyebabkan sebagian aparatur kesulitan memahami penggunaan aplikasi e-Government dan sistem digital lainnya. Oleh karena itu, hasil ini menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah agar pelatihan di bidang teknologi informasi tidak hanya fokus pada penggunaan aplikasi, tetapi juga pada peningkatan kemampuan dasar digital aparatur. Sebagaimana dinyatakan oleh UNDP (2023), literasi digital merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

Dari temuan Sebagian besar informan menyampaikan bahwa pelatihan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotabaru membantu mereka memahami mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan pertanggungjawaban, dan penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Sebelum adanya pelatihan, banyak aparatur mengaku masih mengandalkan bantuan pihak kecamatan dalam penyusunan laporan keuangan. Setelah pelatihan, aparatur menjadi lebih mandiri dan percaya diri dalam menjalankan fungsi tersebut. Hal ini sejalan dengan temuan Moleong (2021) yang menjelaskan bahwa pembelajaran kontekstual melalui pelatihan mampu meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri peserta dalam praktik kerja.

Selain peningkatan kemampuan teknis, pelatihan juga memberikan dampak terhadap sikap kerja dan etika pelayanan publik. Dari hasil observasi di beberapa kantor desa, terlihat adanya perubahan perilaku aparatur yang lebih disiplin dalam kehadiran, lebih sopan dalam pelayanan, serta lebih terbuka terhadap pengaduan masyarakat. Salah satu informan mengatakan, *"Pelatihan membuat kami sadar bahwa pelayanan kepada masyarakat bukan hanya soal administrasi, tapi juga soal sikap dan tanggung jawab."* Temuan ini memperkuat teori Miles, Huberman, dan Saldaña (2018) bahwa proses pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) dapat memengaruhi perubahan perilaku dan sikap kerja secara signifikan.

3.2. Hambatan Pendidikan dan pelatihan aparatur desa



Gambar 1.3 Hambatan Pendidikan dan pelatihan pengembangan kapasitas aparatur desa

Hasil analisis terhadap 76 responden aparatur desa menunjukkan bahwa terdapat berbagai hambatan yang dihadapi saat mengikuti kegiatan pelatihan. Hambatan yang paling

banyak dialami adalah jarak dan lokasi pelatihan yang jauh, sebagaimana diungkapkan oleh 55,3% responden. Banyak aparatur desa yang berasal dari wilayah pesisir atau pedalaman Kabupaten Kotabaru mengaku kesulitan menjangkau lokasi pelatihan yang biasanya diadakan di ibu kota kabupaten. Kondisi geografis dan keterbatasan sarana transportasi membuat mereka harus menempuh perjalanan panjang dan mengeluarkan biaya tambahan. Temuan ini sejalan dengan pendapat Sutoro Eko (2020) bahwa faktor geografis dan aksesibilitas menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas aparatur di daerah terpencil.

Selain itu, 47,4% responden menyebut bahwa keterbatasan anggaran menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan pelatihan. Banyak desa yang tidak memiliki alokasi khusus dalam APBDes untuk kegiatan peningkatan kapasitas, sehingga pelatihan sering kali hanya mengandalkan dukungan dari pemerintah kabupaten atau kementerian terkait. Akibatnya, tidak semua aparatur desa dapat mengikuti pelatihan secara rutin. Hal ini diperkuat oleh temuan wawancara, di mana salah satu kepala desa menyatakan, *"Kami ingin semua perangkat bisa ikut pelatihan, tapi dananya terbatas, kadang hanya dua orang yang bisa dikirim."* Menurut Arikunto (2021), keberhasilan program pelatihan sangat bergantung pada dukungan sumber daya, terutama aspek pendanaan yang memadai.

Faktor berikutnya yang cukup banyak disebut adalah materi pelatihan yang kurang relevan, sebagaimana diungkapkan oleh 21,1% responden. Beberapa aparatur mengeluhkan bahwa materi pelatihan yang diberikan tidak selalu sesuai dengan kondisi atau kebutuhan nyata di lapangan. Misalnya, pelatihan yang berfokus pada aspek administratif sering kali kurang membahas solusi praktis terhadap masalah operasional di desa. Hasil wawancara mendalam juga mengungkapkan bahwa sebagian besar pelatihan masih bersifat umum dan belum mempertimbangkan karakteristik wilayah desa. Menurut Creswell (2018), efektivitas program pelatihan akan meningkat apabila kurikulumnya disusun berdasarkan kebutuhan peserta dan konteks sosial tempat mereka bekerja.

Selain itu, 17,1% responden menyebutkan bahwa waktu pelaksanaan pelatihan sering kali tidak sesuai dengan ketersediaan waktu aparatur. Banyak pelatihan diadakan pada jam kerja reguler, sehingga aparatur sulit meninggalkan tugas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menimbulkan dilema antara tanggung jawab administratif di kantor desa dan kewajiban mengikuti pelatihan. Di sisi lain, 13,2% responden menyoroti keterbatasan sarana dan prasarana, seperti kurangnya fasilitas komputer dan akses internet selama pelatihan. Kondisi ini menyebabkan proses pembelajaran tidak berjalan optimal. Sugiyono (2022) menegaskan

bahwa penyediaan sarana belajar yang memadai merupakan faktor kunci dalam keberhasilan kegiatan pelatihan berbasis teknologi.

Adapun hambatan dengan persentase terendah adalah kompetensi fasilitator (6,6%) dan kurangnya dukungan pimpinan (5,3%). Meskipun relatif kecil, kedua aspek ini tetap penting karena berpengaruh terhadap motivasi peserta dalam mengikuti pelatihan. Fasilitator yang kurang memahami kondisi lapangan cenderung memberikan materi yang bersifat teoretis, sedangkan kurangnya dorongan dari kepala desa dapat mengurangi semangat perangkat untuk belajar. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelatihan aparatur desa di Kabupaten Kotabaru, diperlukan perencanaan yang lebih inklusif, memperhatikan jarak, kebutuhan peserta, serta penyediaan anggaran dan fasilitas yang memadai. Seperti disampaikan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2018), keberhasilan suatu program pemberdayaan sangat ditentukan oleh keseimbangan antara konteks, konten, dan dukungan struktural.

Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya kendala dalam pelaksanaan dan penerapan hasil pelatihan. Beberapa aparatur desa di wilayah pesisir dan pegunungan mengaku sulit menerapkan materi pelatihan karena keterbatasan fasilitas teknologi seperti komputer dan jaringan internet. Selain itu, tingkat pendidikan dan usia juga menjadi faktor penghambat; aparatur yang lebih senior sering kali mengalami kesulitan memahami materi berbasis teknologi. Salah satu sekretaris desa menyampaikan, *"Kami masih belajar pelan-pelan, kadang lupa kalau tidak langsung dipraktikkan."* Temuan ini konsisten dengan penelitian Sugiyono (2022) yang menyebutkan bahwa efektivitas pelatihan sangat dipengaruhi oleh kesiapan peserta dan sarana pendukung.

Dari hasil dokumentasi, diketahui bahwa materi pelatihan yang paling bermanfaat bagi aparatur desa adalah tentang penyusunan perencanaan pembangunan desa (RPJMDes dan RKPDes), serta pelaporan dana desa. Pelatihan ini membantu meningkatkan kemampuan perencanaan berbasis data dan partisipatif, di mana perangkat desa mulai melibatkan masyarakat dalam musyawarah perencanaan. Beberapa desa bahkan mulai menerapkan prinsip *transparency board* untuk mempublikasikan penggunaan dana desa. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang dikemukakan oleh UNDP (1997), yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai pilar utama pemerintahan desa yang baik.

Selain hasil positif, penelitian juga menemukan bahwa pelatihan yang bersifat satu kali (non-berkelanjutan) memiliki dampak yang terbatas. Aparatur desa menyarankan agar pelatihan dilakukan secara berjenjang dan periodik, karena materi yang diberikan sering kali

padat dan sulit diserap dalam waktu singkat. Beberapa informan berharap adanya sistem pendampingan pasca-pelatihan agar mereka bisa langsung mempraktikkan materi yang dipelajari dengan bimbingan ahli. Denzin dan Lincoln (2018) menegaskan bahwa pelatihan yang efektif memerlukan kesinambungan dan refleksi berulang agar peserta benar-benar menginternalisasi kompetensi yang diharapkan.

Penelitian juga menemukan bahwa dukungan kepala desa dan pemerintah kabupaten menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelatihan. Di desa yang memiliki kepala desa dengan komitmen tinggi terhadap peningkatan kapasitas SDM, penerapan hasil pelatihan berjalan lebih optimal. Kepala desa biasanya memfasilitasi perangkat untuk ikut pelatihan tambahan atau mengalokasikan anggaran dari dana desa untuk kegiatan pengembangan kapasitas. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara kebijakan lokal dan kebutuhan nyata di lapangan, sebagaimana ditegaskan oleh Arikunto (2021) bahwa keberhasilan program pelatihan di pemerintahan sangat bergantung pada dukungan struktural dan budaya organisasi yang kondusif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan berperan signifikan dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa di Kabupaten Kotabaru, baik dalam aspek teknis, administratif, maupun etika pelayanan publik. Namun, efektivitasnya bergantung pada kualitas pelaksanaan, kesinambungan program, dan dukungan lingkungan kerja. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pelatihan yang lebih kontekstual dan berkelanjutan, dengan menyesuaikan kebutuhan tiap desa agar hasilnya dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap kinerja pemerintahan desa. Sejalan dengan pandangan Patton (2015), pendekatan kualitatif semacam ini memungkinkan peneliti untuk memahami “makna, nilai, dan transformasi sosial” yang muncul dari proses pembelajaran aparatur secara alami.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pelatihan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Kotabaru. Pelatihan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah daerah maupun lembaga terkait, telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja aparatur desa. Aparatur menjadi lebih memahami tugas dan fungsi dalam tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik berbasis teknologi. Temuan ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya memperkuat

kemampuan teknis, tetapi juga membentuk etika kerja yang lebih profesional dan akuntabel dalam melayani masyarakat. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan pelatihan yang paling mendesak berada pada bidang perencanaan pembangunan dan digitalisasi desa. Aparatur desa menilai pentingnya pelatihan dalam analisis kebutuhan dan potensi desa, penyusunan dokumen RPJMDes dan RKPDes, serta pemanfaatan aplikasi e-Government seperti Siskeudes dan SIPADES. Hal ini mencerminkan adanya kesadaran aparatur terhadap tuntutan tata kelola desa modern yang berbasis data dan teknologi. Namun demikian, pelatihan yang bersifat satu kali dan tidak berkelanjutan masih menjadi kendala, sehingga diperlukan pola pelatihan berjenjang dengan sistem pendampingan agar hasilnya lebih optimal dan berkesinambungan.

Sementara itu, hambatan utama yang dihadapi aparatur dalam mengikuti pelatihan meliputi jarak dan lokasi pelatihan yang jauh, keterbatasan anggaran, serta relevansi materi pelatihan yang belum sesuai dengan kebutuhan lapangan. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan tidak semua aparatur dapat mengikuti pelatihan secara efektif. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperhatikan aspek aksesibilitas, penyediaan sarana prasarana, serta peningkatan kualitas fasilitator. Kesimpulannya, peningkatan kapasitas aparatur desa di Kabupaten Kotabaru akan lebih berhasil apabila dilaksanakan melalui pelatihan yang kontekstual, partisipatif, berbasis teknologi, dan didukung oleh kebijakan yang berkelanjutan dari tingkat kabupaten hingga desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2021). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Agustianti, R., Pandriadi, Nussifera, L., Wahyudi, Angelianawati, L., Meliana, I., Sidik, E. A., Nurlaila, Q., Simarmata, N., Himawan, I. S., Pawan, E., Ikham, F., Andriani, A. D., Ratnadewi, & Hardika, I. R. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. TOHAR MEDIA.
- Annisa, I. S., & Mailani, E. (2023). Analisis Faktor Penyebab Kesulitan Siswa Dalam Pembelajaran Tematik Dengan Menggunakan Metode Miles Dan Huberman Di Kelas IV Sd Negeri 060800 Medan Area. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 6460-6477.
- BPS, 2025, B. P. S. K. K. (n.d.). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Kota Baru*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kota Baru. Retrieved November 16, 2025, from <https://kotabarukab.bps.go.id>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The Sage Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- Eko, S. (2020). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa: Mewujudkan Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Fisipol UGM Press.
- Handayani, R. (2022). *Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Desa di Era Revolusi Industri 4.0*. Jurnal Administrasi Publik, 9(2), 115–128. <https://doi.org/10.31219/osf.io/xyz123>
- Indrajit, R. E. (2020). *E-Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasrullah, R. (2021). *Media Sosial dan Transformasi Digital Pemerintahan Desa*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, R. A., & Septiana, A. A. M. (2022). Prioritas Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Smart Government. *Jurnal Plano Buana*, 2(2), 99–107. <https://doi.org/10.36456/Jpb.V2i2.5308>
- Nugroho, S., Wijaya, A. F., & Said, M. (2023). *Pengembangan Kapasitas Aparatur desa dalam Upaya Mewujudkan Good Governance*. 8(3), 245.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95.
- Thalib, M. A. (2022). Pelatihan Analisis Data Model Miles Dan Huberman Untuk Riset Akuntansi Budaya. *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 5(1), 23–33. <https://doi.org/10.30603/md.v5i1.2581>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*. New York: UNDP.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2023). *Digital Transformation and Local Governance: Strengthening Capacity for Inclusive Development*. New York: UNDP.